E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 3951-3976
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Komunikasi Politik di Era Digital

Elia Agustiana[1*], Suhaimi[2]

[1,2] Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tulang Bawang Lampung, Indonesia
e-mail: eliaagustiana09@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik, terutama melalui penggunaan media sosial sebagai ruang penyebaran informasi dan interaksi antara aktor politik dengan masyarakat. Kehadiran Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang baru dalam produksi konten, pengolahan informasi, analisis respons publik, dan personalisasi pesan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan AI dalam komunikasi politik di era digital serta mengidentifikasi peluang dan risiko yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, laporan institusi, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan AI, komunikasi politik, media sosial, dan perkembangan teknologi digital. Data dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola pemanfaatan, peluang, risiko, serta aspek etika dalam penggunaan AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi produksi dan penyebaran konten, membantu menganalisis percakapan publik, menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens, serta mendukung evaluasi komunikasi politik. Di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan risiko berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulasi

konten, deepfake, dan persoalan perlindungan data. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam komunikasi politik perlu disertai verifikasi informasi, transparansi, pengawasan manusia, dan peningkatan literasi digital agar teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, komunikasi politik, media digital, media sosial, literasi digital*

Abstract

The development of digital technology has transformed political communication, particularly through the use of social media as a space for disseminating information and facilitating interaction between political actors and the public. The emergence of Artificial Intelligence (AI) provides new opportunities for content production, information processing, public response analysis, and political message personalization. This study aims to analyze the use of AI in political communication in the digital era and identify the opportunities and risks associated with its use. The study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from journal articles, books, institutional reports, and other scholarly sources relevant to AI, political communication, social media, and digital technology. The data were analyzed thematically by identifying patterns of utilization, opportunities, risks, and ethical considerations in the use of AI. The findings indicate that AI can improve the efficiency of content production and dissemination, assist in analyzing public conversations, adapt messages to audience characteristics, and support the evaluation of political communication. However, the use of AI also presents risks, including the spread of inaccurate information, content manipulation, deepfakes, and data protection concerns. Therefore, the use of AI in political communication needs to be accompanied by information verification, transparency,

human oversight, and improved digital literacy to ensure that the technology is used responsibly.

Keywords: *Artificial Intelligence, political communication, digital media, social media, digital literacy*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, dan membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan publik, termasuk persoalan politik. Jika sebelumnya komunikasi politik lebih banyak berlangsung melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi, saat ini proses tersebut semakin bergeser ke ruang digital. Media sosial memungkinkan pesan politik disampaikan secara langsung kepada masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada media konvensional sebagai perantara (Alvin, 2022). Perubahan ini membuat komunikasi politik menjadi lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Aktor politik dapat menyampaikan gagasan, program, tanggapan terhadap isu, maupun aktivitas politiknya secara langsung kepada masyarakat, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan respons melalui komentar, unggahan, maupun berbagai bentuk interaksi digital lainnya. Dalam konteks Indonesia, media sosial juga telah digunakan oleh aktor politik sebagai sarana strategis untuk menyampaikan informasi dan membangun komunikasi dengan public (Solihin et al., 2025).

Perubahan pola komunikasi tersebut pada dasarnya memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan politik. Informasi mengenai politik tidak lagi hanya diterima melalui saluran komunikasi yang bersifat satu arah, tetapi dapat dibahas, dikritisi, dan disebarluaskan kembali oleh pengguna media digital. Kondisi ini membuat batas antara komunikator dan penerima pesan menjadi semakin fleksibel (Mitrin et al., 2026). Masyarakat bukan hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen sekaligus

penyebar informasi. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi tersendiri. Kecepatan penyebaran informasi tidak selalu diikuti dengan proses pemeriksaan terhadap kebenaran informasi. UNESCO menempatkan perkembangan internet, media sosial, dan teknologi kecerdasan buatan sebagai bagian dari perubahan lingkungan informasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi proses demokrasi dan pemilu (Bukhori et al., 2025).

Dalam perkembangan berikutnya, kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) memperluas kemungkinan penggunaan teknologi digital dalam komunikasi politik. AI tidak lagi terbatas pada fungsi otomatisasi sederhana, tetapi telah berkembang menjadi teknologi yang mampu mengolah data dalam jumlah besar, mengenali pola, menghasilkan teks, membuat gambar, menghasilkan suara, serta memproduksi video. Kemampuan tersebut menjadikan AI semakin relevan dalam aktivitas komunikasi karena memungkinkan pembuatan dan penyebaran pesan dilakukan dengan waktu dan biaya yang relatif lebih rendah. Dalam komunikasi politik, teknologi ini dapat digunakan untuk membantu menyusun materi komunikasi, menganalisis percakapan publik, mengidentifikasi kecenderungan respons masyarakat terhadap suatu isu, serta menyesuaikan pesan berdasarkan karakteristik kelompok sasaran (Pradipta, 2026; Subadi, 2024).

Pemanfaatan AI juga berkaitan erat dengan semakin besarnya jumlah data yang tersedia di ruang digital. Interaksi pengguna media sosial meninggalkan berbagai bentuk data yang dapat dianalisis untuk memahami perhatian, minat, dan respons masyarakat terhadap suatu isu. Data tersebut dapat menjadi bahan bagi aktor politik dalam merancang strategi komunikasi yang lebih terarah. UNESCO menjelaskan bahwa perkembangan *datafication* dalam politik membuat data dari platform digital semakin memiliki arti penting dalam proses politik, termasuk dalam penggunaan analitik data, platform, bot, dan AI pada berbagai tahapan pemilu. Penggunaan teknologi berbasis data juga membuka kemungkinan dilakukannya *micro-targeting*, yaitu penyampaian pesan yang dirancang untuk kelompok audiens

tertentu berdasarkan karakteristik atau data yang tersedia (Dharmajaya, 2025; Muhaemin, 2024).

Dari sisi komunikasi, kondisi tersebut dapat memberikan beberapa manfaat. AI dapat membantu mempercepat produksi konten politik dan mendukung pengolahan informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama apabila dilakukan secara manual. Analisis berbasis AI juga dapat digunakan untuk membaca kecenderungan percakapan masyarakat di media sosial sehingga komunikator politik memperoleh gambaran mengenai isu yang sedang mendapat perhatian publik. Dalam situasi tertentu, teknologi ini dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih responsif karena pesan dapat disesuaikan dengan perkembangan isu dan karakteristik audiens. Dengan demikian, AI tidak hanya dapat dipandang sebagai alat untuk menghasilkan konten, tetapi juga sebagai teknologi yang berpotensi mendukung proses perencanaan dan evaluasi komunikasi politik (Pardianto, 2026).

Meskipun menawarkan berbagai peluang, penggunaan AI dalam komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari persoalan etika dan kualitas informasi. Kemampuan AI menghasilkan konten secara cepat dan menyerupai produk komunikasi manusia juga dapat dimanfaatkan untuk membuat informasi yang menyesatkan. Teks, gambar, suara, dan video yang dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan AI dapat membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara informasi yang autentik dan informasi yang telah direkayasa. Persoalan ini menjadi semakin penting dalam konteks politik karena informasi yang diterima masyarakat dapat berhubungan dengan pembentukan opini, persepsi terhadap aktor politik, dan pemahaman terhadap isu publik. UNESCO mencatat bahwa AI dalam konteks pemilu dapat membawa manfaat seperti pengurangan biaya dan respons yang lebih cepat, tetapi penyalahgunaannya juga dapat memperbesar penyebaran misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian melalui media social (Santiko & Bahri, 2024).

Risiko tersebut menjadi lebih kompleks dengan berkembangnya teknologi *deepfake* dan media sintetis. Teknologi ini memungkinkan wajah, suara, maupun

tindakan seseorang ditampilkan dalam bentuk yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam komunikasi politik, konten semacam itu berpotensi digunakan untuk membentuk kesan tertentu terhadap seorang tokoh atau suatu kelompok. Masalahnya bukan hanya terletak pada benar atau salahnya sebuah konten, tetapi juga pada kecepatan penyebarannya. Konten yang telah beredar luas dapat memengaruhi persepsi masyarakat sebelum proses verifikasi dilakukan. UNESCO dan berbagai lembaga internasional telah menyoroti bahwa perkembangan AI generatif memperbesar tantangan terhadap integritas informasi, terutama karena biaya pembuatan konten sintetis semakin rendah dan kemampuan teknologi untuk menghasilkan materi yang meyakinkan semakin meningkat (Mirza, 2023).

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam penggunaan AI. Ketika masyarakat menerima pesan politik yang dibuat atau disesuaikan menggunakan sistem algoritmik, tidak selalu mudah untuk mengetahui bagaimana pesan tersebut dihasilkan, data apa yang digunakan, dan mengapa suatu kelompok menjadi sasaran pesan tertentu (Prasojo, 2024). Penggunaan teknologi berbasis algoritma dalam komunikasi politik karena itu tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga dengan persoalan akuntabilitas. Jika AI digunakan tanpa prinsip keterbukaan, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam menilai sumber dan tujuan dari suatu pesan politik. Dalam konteks demokrasi, kondisi tersebut menjadi penting karena kualitas komunikasi politik berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai ariar(Arifin, 2025).

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kemungkinan yang bersifat teoritis. Pada masa Pemilu Presiden Indonesia 2024, penyebaran hoaks melalui media digital menjadi salah satu persoalan dalam komunikasi politik. Penelitian mengenai komunikasi politik terkait hoaks pada Pemilu Presiden 2024 menunjukkan bahwa konten menyesatkan dan manipulatif banyak disebarkan melalui media digital, termasuk dalam bentuk video di YouTube dan TikTok. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa konten hoaks yang

menggunakan AI mulai muncul dalam komunikasi politik selama periode pemilu. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi AI telah mulai bersinggungan secara langsung dengan praktik komunikasi politik di Indonesia (Azis et al., 2025).

Pada saat yang sama, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik Indonesia memperlihatkan bahwa platform digital telah menjadi ruang yang penting bagi aktor politik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Penelitian mengenai penggunaan media sosial oleh aktor politik di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi strategis kepada publik. Perkembangan ini menjadi semakin menarik ketika digabungkan dengan kemampuan AI yang dapat membantu produksi, pengolahan, dan distribusi pesan secara lebih cepat. Dengan demikian, komunikasi politik di era digital tidak hanya mengalami perubahan pada media yang digunakan, tetapi juga pada teknologi yang mendukung proses pembentukan dan penyebaran pesan (Astuti, 2024; Nasution & Frasetya, 2025).

Di sisi lain, peningkatan penggunaan AI dalam komunikasi politik perlu diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang diterima. Literasi digital menjadi salah satu aspek penting karena masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami karakter informasi yang muncul melalui teknologi tersebut. Kemampuan mengenali konten manipulatif, memeriksa sumber informasi, memahami konteks suatu pesan, dan membandingkan informasi dengan sumber yang kredibel menjadi semakin penting ketika teknologi AI dapat menghasilkan konten dalam jumlah besar. Upaya menjaga kualitas komunikasi politik dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab aktor politik dan penyedia platform digital, tetapi juga melibatkan media, lembaga pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, akademisi, dan Masyarakat (Alkatiri et al., 2026).

Berdasarkan perkembangan tersebut, pemanfaatan AI dalam komunikasi politik perlu dilihat secara lebih luas daripada sekadar penggunaan teknologi untuk

mempercepat produksi konten. AI telah membuka kemungkinan baru dalam pengolahan data, penyusunan pesan, pemetaan respons publik, dan penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan mengenai keaslian informasi, transparansi, manipulasi, privasi, dan akuntabilitas. OECD juga menempatkan disinformasi dalam periode pemilu, manipulasi informasi, serta perkembangan AI generatif sebagai bagian dari tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga lingkungan informasi yang dapat dipercaya.

Oleh karena itu, kajian mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam komunikasi politik di era digital menjadi penting untuk memahami bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam proses komunikasi politik sekaligus melihat peluang dan persoalan yang menyertainya. Pembahasan mengenai AI tidak cukup diarahkan pada kemampuan teknologinya, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut memengaruhi cara pesan politik diproduksi, disampaikan, diterima, dan dimaknai oleh masyarakat. Kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perubahan komunikasi politik di tengah perkembangan teknologi digital serta menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan tetap memperhatikan kualitas informasi dalam ruang publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam komunikasi politik di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami perkembangan, bentuk pemanfaatan, peluang, serta berbagai persoalan yang muncul dalam penggunaan AI sebagai bagian dari komunikasi politik. Pendekatan ini memungkinkan fenomena dikaji berdasarkan informasi dan temuan yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber ilmiah maupun sumber institusional yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber yang membahas AI, komunikasi politik, media sosial, disinformasi, *deepfake*, literasi digital, dan perkembangan teknologi dalam proses politik. Sumber data utama berasal dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen dari lembaga pemerintah dan organisasi yang memiliki relevansi dengan perkembangan AI dan komunikasi politik. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi. Literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan AI dalam komunikasi politik di ruang digital diprioritaskan agar pembahasan dapat menggambarkan perkembangan fenomena secara lebih aktual.

Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti *Artificial Intelligence*, AI generatif, komunikasi politik, komunikasi politik digital, media sosial, *deepfake*, disinformasi, dan pemilu. Hasil penelusuran kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan kesesuaian judul dan abstrak, relevansi isi terhadap fokus penelitian, tahun publikasi, serta kredibilitas penerbit atau lembaga yang menghasilkan sumber tersebut. Literatur yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus kajian atau memiliki informasi yang tidak memadai tidak digunakan sebagai dasar analisis.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, pengelompokan informasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi dari berbagai sumber dipilih dan difokuskan pada aspek yang berhubungan dengan pemanfaatan AI dalam komunikasi politik. Data kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu bentuk pemanfaatan AI, manfaat AI dalam komunikasi politik, penggunaan AI dalam produksi dan penyebaran pesan politik, serta risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Pengelompokan tematik dilakukan untuk memudahkan perbandingan informasi dari berbagai sumber dan menemukan pola yang muncul dalam literatur.

Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif. Informasi dari sumber yang berbeda dibandingkan dan dihubungkan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai posisi AI dalam perkembangan komunikasi politik digital. Analisis tidak hanya memperhatikan manfaat teknologi, tetapi juga mempertimbangkan persoalan seperti akurasi informasi, transparansi, manipulasi konten, *deepfake*, privasi, dan disinformasi. Dengan cara tersebut, penelitian dapat menggambarkan pemanfaatan AI secara lebih seimbang antara peluang yang ditawarkan dan persoalan yang perlu diperhatikan.

Keabsahan data dijaga melalui perbandingan antarsumber atau triangulasi sumber. Informasi mengenai suatu fenomena dibandingkan dengan sumber lain yang memiliki kredibilitas dan fokus pembahasan yang relevan. Artikel ilmiah digunakan untuk memperoleh temuan penelitian, sedangkan laporan dan dokumen lembaga digunakan untuk memperkuat informasi mengenai perkembangan teknologi, kebijakan, dan konteks komunikasi politik. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber serta memastikan bahwa interpretasi yang digunakan dalam penelitian memiliki dasar informasi yang memadai.

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menyusun pemahaman mengenai bagaimana AI dimanfaatkan dalam komunikasi politik di era digital, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan yang menyertainya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dari keseluruhan literatur yang dianalisis. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan pemanfaatan AI dalam komunikasi politik tanpa melepaskan konteks sosial dan etika yang menyertai penggunaan teknologi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah memperluas cara teknologi digital digunakan dalam

komunikasi politik. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis untuk menghasilkan konten, tetapi mulai digunakan dalam berbagai tahapan komunikasi, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi karakteristik audiens, penyusunan pesan, produksi konten, hingga pemantauan respons masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik di era digital semakin bergeser ke arah komunikasi yang berbasis data dan teknologi. Aktor politik tidak lagi hanya mengandalkan komunikasi massa dengan pesan yang relatif seragam, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan pesan yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik dan respons kelompok masyarakat tertentu.

Pemanfaatan dan Peluang Artificial Intelligence dalam Komunikasi Politik Digital

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan pada pola komunikasi politik di ruang digital. Pemanfaatan AI tidak lagi terbatas pada fungsi teknologi yang bersifat teknis, tetapi mulai digunakan dalam berbagai aktivitas komunikasi politik, mulai dari pengolahan informasi, penyusunan pesan, produksi konten, analisis percakapan publik, hingga pengelolaan interaksi dengan masyarakat. Perubahan tersebut berlangsung seiring dengan semakin kuatnya posisi media digital sebagai ruang komunikasi antara aktor politik dan masyarakat. Dalam lingkungan komunikasi yang bergerak cepat, kemampuan untuk mengolah informasi dan menghasilkan pesan dalam waktu singkat menjadi kebutuhan yang semakin penting. AI kemudian hadir sebagai salah satu teknologi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus membuka bentuk-bentuk komunikasi politik yang sebelumnya sulit dilakukan secara konvensional.

Salah satu bentuk pemanfaatan AI yang paling terlihat adalah dalam produksi konten politik. Kehadiran AI generatif memungkinkan pengguna menghasilkan teks, gambar, suara, maupun video dengan bantuan instruksi tertentu. Dalam komunikasi politik, kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menyiapkan materi publikasi, menyusun draf pesan, mengembangkan ide konten, membuat materi

visual, serta menyesuaikan format komunikasi dengan karakteristik platform digital. Sebuah gagasan atau pernyataan politik dapat dikembangkan menjadi beberapa bentuk komunikasi yang berbeda sehingga dapat digunakan pada berbagai saluran, seperti media sosial, situs web, dan materi audiovisual. Kemampuan tersebut membuat proses produksi komunikasi menjadi lebih fleksibel karena satu informasi dapat dikembangkan ke dalam berbagai format tanpa seluruh proses harus dilakukan secara manual.

Kecepatan produksi menjadi salah satu alasan AI semakin relevan dalam komunikasi politik digital. Karakter media sosial yang berlangsung hampir secara real time membuat isu politik dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat. Suatu persoalan yang sebelumnya belum mendapat banyak perhatian dapat berkembang menjadi pembicaraan publik hanya dalam beberapa jam. Dalam situasi seperti ini, aktor politik membutuhkan kemampuan untuk merespons perkembangan informasi dengan cepat. AI dapat membantu mempercepat pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan, pengolahan, dan penyesuaian materi komunikasi. Namun, kecepatan tersebut tetap perlu diimbangi dengan pemeriksaan terhadap informasi yang digunakan karena pesan politik tidak hanya dituntut untuk cepat, tetapi juga harus sesuai dengan fakta dan konteks persoalan.

Selain produksi konten, AI dapat digunakan untuk mengolah data yang berasal dari aktivitas masyarakat di ruang digital. Media sosial menghasilkan berbagai bentuk data, seperti komentar, unggahan, tanda suka, pembagian konten, dan percakapan mengenai isu tertentu. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat topik yang sedang memperoleh perhatian masyarakat serta memahami bagaimana pengguna merespons suatu isu. AI memiliki kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola tertentu yang sulit ditemukan apabila seluruh proses dilakukan secara manual. Dalam konteks komunikasi politik, kemampuan tersebut dapat membantu aktor politik memperoleh informasi mengenai kecenderungan percakapan publik dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi komunikasi.

Salah satu penerapannya adalah analisis sentimen. Teknologi pemrosesan bahasa berbasis AI dapat membantu mengelompokkan percakapan berdasarkan kecenderungan respons tertentu, seperti positif, negatif, atau netral. Hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu pernyataan, isu, atau kebijakan diterima oleh pengguna media sosial. Apabila suatu isu memperoleh banyak respons negatif, misalnya, informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap cara penyampaian pesan. Sebaliknya, isu yang mendapatkan perhatian positif dapat menunjukkan topik yang dianggap relevan oleh kelompok masyarakat tertentu. AI dengan demikian dapat mendukung proses komunikasi yang lebih responsif karena informasi mengenai reaksi publik dapat diperoleh secara lebih cepat.

AI juga dapat membantu mengidentifikasi topik yang sedang berkembang dalam percakapan digital. Kemampuan ini memungkinkan komunikator politik memantau perubahan perhatian masyarakat dan mengenali isu yang sedang menjadi pembicaraan. Dalam lingkungan komunikasi politik yang sangat dinamis, pemantauan semacam ini dapat membantu menentukan informasi apa yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun demikian, tingginya jumlah percakapan di media sosial tidak selalu menunjukkan bahwa suatu isu penting bagi seluruh masyarakat. Pengguna media sosial bukan representasi keseluruhan populasi, sedangkan sebagian masyarakat mungkin tidak aktif menyampaikan pendapatnya melalui platform digital. Oleh karena itu, hasil analisis AI perlu dipahami sebagai salah satu sumber informasi dan tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan keseluruhan opini publik.

Kemampuan AI dalam mengolah data juga membuka peluang bagi personalisasi pesan politik. Dalam komunikasi digital, pesan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok audiens tertentu. Masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan ekonomi dapat memperoleh informasi yang lebih banyak membahas lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, atau kebijakan ekonomi, sedangkan kelompok yang lebih memperhatikan pendidikan dapat menerima pesan

mengenai sekolah, perguruan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan ini memungkinkan komunikasi politik menjadi lebih relevan karena pesan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perhatian kelompok sasaran.

Personalisasi tersebut menunjukkan adanya perubahan dari komunikasi politik yang bersifat massal menuju komunikasi yang lebih tersegmentasi. Pada media konvensional, pesan umumnya disampaikan kepada audiens yang luas dengan materi yang relatif sama. Media digital memungkinkan penyampaian pesan yang lebih spesifik, sedangkan AI memperkuat kemampuan tersebut melalui pengolahan data dan identifikasi pola perilaku. Dalam konteks ini, teknologi dapat membantu aktor politik mengembangkan komunikasi yang lebih terarah. Namun, kemampuan personalisasi juga perlu disertai perhatian terhadap penggunaan data karena masyarakat belum tentu mengetahui mengapa mereka menerima pesan tertentu atau berdasarkan informasi apa suatu pesan ditujukan kepada mereka.

Selain membantu produksi dan analisis informasi, AI memiliki peluang dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan komunikasi politik. Sejumlah pekerjaan yang bersifat repetitif, seperti menyusun draf, mengelompokkan komentar, menerjemahkan informasi, melakukan transkripsi, dan menghasilkan variasi konten, dapat dibantu dengan teknologi AI. Efisiensi tersebut memungkinkan sumber daya manusia lebih banyak diarahkan pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, pertimbangan strategis, dan pengambilan keputusan. AI dengan demikian dapat berfungsi sebagai alat pendukung yang mengurangi beban pekerjaan teknis tanpa harus menggantikan seluruh peran manusia dalam komunikasi politik.

Efisiensi juga terlihat dari kemampuan AI menghasilkan berbagai variasi pesan berdasarkan satu informasi utama. Materi yang sama dapat disesuaikan menjadi teks pendek untuk media sosial, narasi video, infografis, atau bentuk komunikasi lainnya. Hal tersebut membantu pengelolaan komunikasi pada berbagai platform digital yang memiliki karakteristik audiens dan format yang berbeda. Dalam situasi ketika komunikasi politik membutuhkan frekuensi produksi konten yang

tinggi, kemampuan AI tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat distribusi informasi.

Peluang lainnya adalah kemampuan AI dalam mendukung evaluasi komunikasi. Respons masyarakat terhadap suatu pesan dapat dianalisis berdasarkan komentar, interaksi, maupun pola percakapan yang muncul setelah pesan dipublikasikan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagian komunikasi yang memperoleh perhatian, menimbulkan pertanyaan, atau belum dipahami dengan baik. Hasil evaluasi kemudian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pesan berikutnya. Dengan demikian, komunikasi politik dapat berkembang menjadi proses yang lebih adaptif karena terdapat hubungan antara penyampaian pesan, respons masyarakat, dan penyesuaian strategi komunikasi.

AI juga memungkinkan interaksi antara aktor politik dan masyarakat dilakukan dalam skala yang lebih luas. Sistem berbasis AI, seperti *chatbot*, dapat digunakan untuk memberikan informasi terhadap pertanyaan yang bersifat umum dan berulang. Dalam komunikasi publik, sistem tersebut dapat membantu menyediakan informasi mengenai program, kegiatan, agenda, atau isu tertentu secara lebih cepat. Penggunaan *chatbot* dapat mengurangi beban komunikasi administratif dan memberikan akses informasi yang lebih fleksibel bagi masyarakat.

Walaupun demikian, penggunaan AI dalam interaksi politik tetap memiliki keterbatasan. Komunikasi politik sering kali berhubungan dengan persoalan sosial dan kebijakan yang kompleks sehingga tidak semua pertanyaan dapat dijawab secara tepat melalui sistem otomatis. Sistem AI yang menggunakan informasi tidak lengkap atau tidak diperbarui juga dapat memberikan jawaban yang keliru. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam komunikasi publik tetap membutuhkan mekanisme pengawasan dan keterlibatan manusia, terutama ketika informasi yang diberikan berkaitan dengan persoalan yang penting bagi masyarakat.

Dari sisi jangkauan, AI juga dapat membantu menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Kemampuan teknologi dalam menghasilkan variasi bahasa dan format informasi dapat membantu memperluas

akses terhadap pesan politik. Teknologi penerjemahan berbasis AI, misalnya, dapat membantu menyampaikan informasi dalam bahasa yang berbeda. Sementara itu, kemampuan menghasilkan berbagai format konten dapat membantu menyesuaikan komunikasi dengan kebiasaan pengguna media yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya berfungsi untuk mempercepat produksi informasi, tetapi juga dapat memperluas kemungkinan penyampaian informasi kepada kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Namun, peningkatan efektivitas komunikasi tidak dapat hanya diukur dari kecepatan, jumlah konten, atau luasnya jangkauan informasi. Komunikasi politik yang efektif tetap membutuhkan akurasi, relevansi, konteks, dan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat. Data yang dihasilkan AI juga tidak dapat menggantikan sepenuhnya pertimbangan manusia karena data hanya menunjukkan pola berdasarkan informasi yang tersedia. Keputusan mengenai isi dan arah komunikasi tetap membutuhkan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi sosial dan politik.

Dengan demikian, pemanfaatan AI dalam komunikasi politik memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, personalisasi, dan interaksi dengan masyarakat. AI dapat membantu aktor politik mengelola informasi dalam jumlah besar, memahami kecenderungan percakapan publik, menghasilkan berbagai bentuk konten, serta mengevaluasi respons terhadap pesan yang telah disampaikan. Teknologi ini juga memungkinkan komunikasi dilakukan secara lebih adaptif sesuai dengan perkembangan isu dan karakteristik audiens.

Pada akhirnya, AI sebaiknya diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam komunikasi politik, bukan sebagai pengganti pertimbangan manusia. Teknologi dapat membantu menjalankan pekerjaan tertentu secara lebih cepat dan efisien, tetapi substansi pesan, penilaian terhadap konteks, serta tanggung jawab komunikasi tetap membutuhkan keterlibatan manusia. Dengan penggunaan yang tepat, AI dapat menjadi bagian penting dari transformasi komunikasi politik digital sekaligus

memberikan peluang bagi terciptanya komunikasi yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Risiko, Etika, dan Tata Kelola Artificial Intelligence dalam Komunikasi Politik

Di samping memberikan peluang dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) juga membawa sejumlah risiko yang perlu mendapat perhatian. Kemampuan AI dalam menghasilkan dan menyebarkan informasi secara cepat dapat memberikan manfaat bagi komunikasi politik, tetapi pada saat yang sama dapat digunakan untuk memproduksi konten yang menyesatkan, memanipulasi informasi, dan membentuk persepsi masyarakat secara tidak transparan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena komunikasi politik memiliki hubungan langsung dengan pembentukan pemahaman masyarakat mengenai kandidat, kebijakan, isu publik, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan demokratis.

Salah satu risiko yang paling menonjol adalah penggunaan AI untuk menghasilkan konten yang tidak sesuai dengan kenyataan. Teknologi AI generatif memungkinkan pembuatan teks, gambar, suara, dan video yang tampak meyakinkan meskipun tidak menggambarkan peristiwa sebenarnya. Dalam konteks politik, kemampuan tersebut dapat digunakan untuk membuat pernyataan seolah-olah berasal dari seorang tokoh, mengubah gambar suatu peristiwa, atau menghasilkan video yang menampilkan seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Konten semacam ini menjadi semakin sulit dikenali ketika kualitas teknologi meningkat dan masyarakat menerima informasi terutama melalui media sosial.

Fenomena *deepfake* menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan kompleksitas persoalan tersebut. Manipulasi wajah, suara, dan gerakan seseorang dapat dilakukan menggunakan teknologi AI sehingga menghasilkan materi audiovisual yang terlihat autentik. Dalam komunikasi politik, *deepfake* dapat digunakan untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu atau

kelompok tertentu. Persoalannya tidak hanya terletak pada isi konten yang palsu, tetapi juga pada kecepatan penyebarannya. Konten yang telah mendapatkan perhatian luas di media sosial dapat membentuk persepsi sebelum proses pemeriksaan fakta dilakukan. Klarifikasi yang muncul setelahnya belum tentu dapat menjangkau audiens yang sama luasnya dengan konten awal.

Perkembangan tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya risiko disinformasi. AI memungkinkan produksi konten dilakukan dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Satu informasi yang salah dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk pesan dan disebarkan melalui sejumlah platform. Kondisi tersebut dapat memperbesar skala penyebaran informasi yang tidak akurat. Dalam komunikasi politik, disinformasi dapat diarahkan pada berbagai isu, seperti kandidat, partai politik, kebijakan pemerintah, proses pemilu, maupun kelompok masyarakat tertentu.

Namun, keberadaan AI tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai penyebab munculnya disinformasi. Teknologi pada dasarnya merupakan alat yang dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Persoalan muncul ketika kemampuan teknologi digunakan tanpa memperhatikan akurasi, etika, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perhatian tidak hanya perlu diarahkan pada teknologi AI, tetapi juga pada aktor yang menggunakannya, tujuan penggunaannya, mekanisme penyebaran konten, dan lingkungan digital tempat informasi tersebut beredar.

Risiko lainnya berkaitan dengan semakin sulitnya masyarakat membedakan antara informasi autentik dan informasi yang telah dimanipulasi. Ketika teknologi AI mampu menghasilkan konten yang semakin menyerupai produk manusia, proses verifikasi menjadi lebih penting. Masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan tampilan visual atau suara sebagai dasar untuk menentukan kebenaran sebuah informasi. Bahkan, perkembangan AI dapat menciptakan kondisi ketika informasi yang benar juga diragukan karena masyarakat memiliki alasan untuk menganggap bahwa suatu konten mungkin telah direkayasa. Situasi ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital secara lebih luas.

Persoalan etika kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan AI dalam komunikasi politik. Penggunaan AI untuk membantu membuat konten seharusnya mempertimbangkan kejelasan mengenai asal-usul informasi dan proses pembuatannya. Transparansi diperlukan agar masyarakat tidak memperoleh kesan bahwa suatu konten merupakan komunikasi langsung dari tokoh atau organisasi tertentu apabila sebenarnya konten tersebut dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI. Keterbukaan semacam ini menjadi penting terutama untuk materi yang berkaitan dengan isu politik dan kepentingan publik.

Selain transparansi konten, persoalan etika juga berkaitan dengan penggunaan data masyarakat. Kemampuan AI dalam melakukan personalisasi pesan membutuhkan data yang cukup mengenai karakteristik dan perilaku audiens. Data tersebut dapat berasal dari aktivitas digital masyarakat dan digunakan untuk menentukan jenis pesan yang dianggap sesuai bagi kelompok tertentu. Penggunaan data untuk kepentingan komunikasi politik perlu memperhatikan privasi dan batas pemanfaatan informasi. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan untuk tujuan apa data tersebut diproses.

Penggunaan AI secara berlebihan juga dapat menyebabkan komunikasi politik menjadi terlalu tersegmentasi. Ketika kelompok masyarakat menerima pesan yang berbeda berdasarkan karakteristik atau perilaku digital mereka, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi publik yang sama. Kondisi tersebut dapat mengurangi ruang diskusi bersama karena setiap kelompok berada dalam lingkungan informasi yang berbeda. Oleh sebab itu, personalisasi komunikasi perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan informasi dasar yang bersifat publik dan dapat diverifikasi oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena media sosial telah menjadi bagian penting dari komunikasi politik. Informasi politik dapat menyebar melalui berbagai platform dalam waktu singkat dan dapat diproduksi ulang oleh pengguna. Perkembangan AI kemudian menambah kemampuan dalam menghasilkan berbagai bentuk konten. Pengalaman pada Pemilu

2024 memperlihatkan bahwa masyarakat menghadapi dinamika informasi politik yang cukup kompleks, termasuk beredarnya informasi yang tidak akurat dan konten manipulatif di ruang digital. Kehadiran teknologi AI membuat tantangan tersebut perlu dipahami secara lebih serius karena produksi konten dapat dilakukan dengan cara yang semakin mudah dan meyakinkan.

Karena itu, literasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi penggunaan AI dalam komunikasi politik. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi, memeriksa konteks, membandingkan informasi dengan sumber lain, serta mengenali kemungkinan adanya manipulasi digital. Literasi digital dalam konteks ini tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan media sosial atau perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam menilai informasi yang diterima. Semakin tinggi kemampuan teknologi dalam menghasilkan konten yang meyakinkan, semakin besar pula kebutuhan masyarakat untuk memiliki kemampuan verifikasi.

Di sisi lain, tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Aktor politik, organisasi politik, media, penyedia platform digital, lembaga pemerintah, dan institusi terkait juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih bertanggung jawab. Penggunaan AI perlu disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sehingga ketika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan, terdapat pihak yang dapat dimintai penjelasan. Prinsip transparansi juga perlu diterapkan dalam penggunaan teknologi, terutama ketika AI digunakan untuk menghasilkan atau memodifikasi informasi politik.

Tata kelola AI dalam komunikasi politik dengan demikian perlu memperhatikan beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu akurasi informasi, transparansi penggunaan AI, perlindungan data, pengawasan manusia, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi. Tidak semua penggunaan AI perlu dibatasi, karena teknologi tersebut juga memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa

penggunaan teknologi tidak mengorbankan kualitas informasi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa AI menghadirkan hubungan yang kompleks antara peluang teknologi dan risiko komunikasi politik. Teknologi yang sama dapat digunakan untuk mempercepat produksi informasi, meningkatkan interaksi, dan memahami respons masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat manipulasi yang lebih sulit dikenali. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam komunikasi politik perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab yang menempatkan manusia sebagai pengarah dan pengawas teknologi.

Pada akhirnya, perkembangan AI menunjukkan bahwa tantangan komunikasi politik di era digital bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan secara cepat, tetapi juga kemampuan menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap informasi. Pemanfaatan AI yang bertanggung jawab membutuhkan keseimbangan antara inovasi teknologi, kebutuhan komunikasi, etika, transparansi, perlindungan data, dan literasi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perkembangan AI dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari transformasi komunikasi politik tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam ruang publik.

Pembahasan

Hasil kajian mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam komunikasi politik digital menunjukkan bahwa teknologi ini memberikan perubahan pada proses produksi, penyebaran, dan evaluasi pesan politik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lindawaty & Sartika (2025) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis AI dalam komunikasi digital dapat membantu mempercepat pengolahan informasi dan penyusunan pesan sesuai dengan karakteristik audiens. Dalam konteks komunikasi politik, kemampuan tersebut menjadi penting karena informasi politik di media digital berkembang dengan cepat

dan membutuhkan respons yang relatif singkat. AI dapat membantu mengolah berbagai informasi, mengidentifikasi topik yang sedang berkembang, serta menghasilkan variasi konten untuk disampaikan melalui berbagai platform digital. Dengan demikian, penggunaan AI tidak hanya berkaitan dengan otomatisasi pekerjaan, tetapi juga mendukung proses komunikasi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan digital.

Temuan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Cindrakasih et al (2026) yang membahas penggunaan AI dalam analisis sentimen pada media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan respons pengguna terhadap suatu isu berdasarkan data percakapan digital. Hasil tersebut memperkuat temuan kajian ini bahwa komentar, unggahan, dan interaksi masyarakat di media sosial dapat menjadi sumber informasi untuk memahami respons publik terhadap pesan politik. Analisis sentimen memungkinkan komunikator memperoleh gambaran mengenai kecenderungan respons positif, negatif, maupun netral terhadap suatu isu. Meskipun demikian, hasil analisis tersebut tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati karena percakapan di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan keseluruhan opini masyarakat. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan AI lebih tepat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi komunikasi daripada sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan.

Sementara itu, penelitian Pratama & Octarina (2026) mengenai AI generatif dalam komunikasi digital menunjukkan bahwa kemampuan AI dalam menghasilkan teks, gambar, audio, dan video memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi produksi konten. Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian ini yang menunjukkan bahwa AI generatif dapat membantu aktor politik membuat berbagai bentuk materi komunikasi dari satu informasi utama. Pesan dapat disesuaikan dengan karakteristik platform dan kelompok audiens sehingga komunikasi menjadi lebih fleksibel. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya pengawasan manusia terhadap konten yang dihasilkan AI karena teknologi dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat apabila menggunakan data atau instruksi

yang keliru. Hal ini memperkuat pandangan bahwa efisiensi produksi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan terhadap verifikasi informasi dan tanggung jawab dalam penggunaannya.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan AI dalam komunikasi digital memiliki keterkaitan yang kuat dengan tiga aspek utama, yaitu efisiensi produksi informasi, kemampuan menganalisis respons publik, dan penyesuaian pesan berdasarkan karakteristik audiens. Hasil kajian ini memperluas pemahaman tersebut dalam konteks komunikasi politik dengan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut dapat digunakan secara bersamaan dalam membangun komunikasi yang lebih responsif. AI dapat membantu mengolah informasi dalam jumlah besar, menghasilkan konten dalam berbagai format, serta memberikan informasi mengenai pola interaksi masyarakat. Akan tetapi, penggunaan teknologi tersebut tetap membutuhkan keterlibatan manusia untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan sesuai dengan konteks komunikasi politik.

Di sisi lain, hasil kajian mengenai risiko AI juga menunjukkan adanya perbedaan antara manfaat teknologi dan konsekuensi penggunaannya. Kemampuan AI generatif dalam menghasilkan konten yang menyerupai informasi asli dapat digunakan untuk membuat informasi yang menyesatkan, termasuk manipulasi gambar, suara, dan video. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi politik tidak hanya menghasilkan peluang, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap literasi digital, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, temuan penelitian terdahulu mengenai manfaat AI perlu ditempatkan bersama dengan aspek etika dan tata kelola agar pemanfaatan teknologi dalam komunikasi politik tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan jangkauan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas informasi dan tanggung jawab kepada masyarakat.

SIMPULAN

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam komunikasi politik di era digital memberikan peluang dalam meningkatkan efisiensi produksi konten, pengolahan informasi, analisis respons masyarakat, personalisasi pesan, serta perluasan jangkauan komunikasi. AI memungkinkan aktor politik mengelola informasi dalam jumlah besar dan menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens secara lebih cepat. Namun, penggunaan AI juga menghadirkan risiko berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulasi konten, *deepfake*, penyalahgunaan data, dan berkurangnya transparansi dalam proses komunikasi politik.

Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam komunikasi politik perlu disertai verifikasi informasi, transparansi penggunaan teknologi, perlindungan data, pengawasan manusia, dan peningkatan literasi digital masyarakat. AI sebaiknya ditempatkan sebagai alat pendukung yang membantu proses komunikasi, sementara penentuan substansi pesan dan tanggung jawab terhadap informasi tetap berada pada manusia. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan AI dapat diarahkan untuk mendukung komunikasi politik digital yang lebih efektif sekaligus tetap memperhatikan kualitas informasi dan etika komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alkatiri, F., Hernawan, W., & Waskito, B. (2026). Perilaku Komunikasi Siswa dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence pada Kegiatan Akademik. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *6*(3), 1515–1524.

Alvin, S. (2022). *Komunikasi politik di era digital: dari big data, influencer relations & kekuatan selebriti, hingga politik tawa*. Deepublish.

Arifin, M. S. (2025). Artificial Intelegence (AI) dan Politik: Analisis Terhadap Peran dan Signifikansi AI dalam Komunikasi Politik 2024 di Indonesia. *Hudan Lin*

Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, *6*(1), 47–58.

Astuti, S. A. (2024). Literasi kemanfaatan teknologi terhadap cyber terrorism di era disrupsi dengan AI (Artificial Intelligence). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *5*(3).

Azis, H., Indreswari, E. P., & Ramadhani, O. R. K. (2025). A decade of Indonesian politics: The escalation of political information disorder and strategies to address it in the digital era. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *29*(2), 145–164.

Bukhori, B., Shabrina, N., & Irwansyah, I. (2025). Framing Pemberitaan Etika dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) pada Kampanye. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, *17*(2), 384–407.

Cindrakasih, R. R. R., Novianita, R., Atmaja, J., & Aziz, A. (2026). Peran artificial intelligence dan media digital sebagai instrumen penguatan nasionalisme generasi muda melalui pendekatan edukatif dan komunikatif dalam konteks revolusi industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, *12*(1), 260–281.

Dharmajaya, M. A. (2025). Komunikasi politik dalam lanskap digital: Inovasi hingga disinformasi berita politik. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, *8*(1), 230–235.

Lindawaty, D. S., & Sartika, I. (2025). Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pengembangan desa digital. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *16*(2), 159–176.

Mirza, I. M. M. (2023). Implementasi artificial intelligence dalam iklan politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0. *Jurnal Visual Ideas*, *3*(2), 65–82.

Mitrin, A., Rahman, R., & Irawan, Y. (2026). Media Sintetis Berbasis AI dan Krisis Kepercayaan Publik dalam Komunikasi Politik. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *4*(1), 54–60.

Muhaemin, M. (2024). Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (AI) dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual. *Jurnal Imajinasi*,

8(2), 180–189.

Nasution, N. A., & Frasetya, V. (2025). Penguatan Literasi Artificial Intelligence Melalui Pelatihan Kolaboratif Untuk Dosen Ilmu Komunikasi. *Jurnal Mitrawarga*, *4*(2), 47–57.

Pardianto, P. (2026). Dinamika Komunikasi Islam Dalam Membangun Relasi Dengan Organisasi Politik Pada Era AI (Artificial Intelligence) Di Indonesia. *Journal of Management, Education and Communication*, *4*(1), 1–20.

Pradipta, F. T. D. (2026). Integrasi Teknologi Pendidikan Berbasis Artificial Intelligence, dan Civic Intelligence dalam Pendidikan Politik. *BATARA: Journal of Learning Technology and Digital Society*, *1*(1), 26–36.

Prasojo, R. (2024). Publik Relation di Era Digital: Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence terhadap Praktik Public Relations Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(3), 208–212.

Pratama, L. R., & Octarina, N. F. (2026). Pengaturan Pemidanaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Penyebaran Hoax Politik Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 780–791.

Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). Analisis Wacana Pada Fenomena Pengunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13215–13231.

Solihin, O., Firmansyah, D., Abdullah, A. Z., & Dhahiyat, A. P. (2025). Pemanfaatan AI dalam analisis isi digital: Studi kasus komentar media sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, *3*(2), 117–129.

Subadi, S. (2024). Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Iklan Politik: Studi Kasus Kampanye Menggunakan Presiden Soeharto Versi AI. *Jurnal Senirupa Warna*, *12*(2), 88–101.